

IMPLEMENTASI PROGRAM PELITA DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG

Muhamad Firmanyash^{*1}, Suherman², Lalas Sulastr³
^{1,2,3}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 18, 2026

Revised Mei 22, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Public Policy
Implementation of Public Policy
Pelita Program
Economic Self-Reliance of The
Community

ABSTRACT

This research aims to understand the implementation of the PELITA Program in supporting economic self-reliance of the community in Tanjungkerta Sub-district, Sumedang Regency, as well as to identify the inhibiting factors and the efforts made to overcome those barriers. The research method used is qualitative. The sampling technique employed is purposive sampling, with informants including the Head of Tanjungkerta Sub-district, the Sub-district Secretary, the Head of Human Empowerment Division, and staff members involved in the implementation of the PELITA Program. Data collection techniques include literature review and field studies through observation, interviews, documentation, and triangulation. The data validity techniques applied are credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. The data analysis techniques consist of data collection, data reduction, data display, and verification. Based on the research findings, it is concluded that the implementation of the PELITA Program in supporting community economic self-reliance has been effective and has had a tangible impact in reducing extreme poverty—from 28 households in 2023 to 0 households in 2025. However, several obstacles were identified in the program's implementation, such as low community participation, lack of outreach, limited resources, and suboptimal communication between the government and the community. Efforts to overcome these barriers included increasing outreach activities, involving the community in the planning and evaluation process, and strengthening inter-agency coordination. This research includes the need for more intensive and sustainable community engagement strategies, increased allocation of resources both human and financial, periodic evaluation of the program's outcomes, and continuous capacity-building programs for stakeholders involved in PELITA. Furthermore, the government should adopt a more inclusive approach to ensure all community groups are actively involved and benefit from the program.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Muhamad Firmasnyah,
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas April
Jln. Angkrek Situ. No 19 Sumedang.
Email: fahkrezaфирman@gmail.com

1. INTRODUCTION

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Secara internasional, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai hidup dengan kurang dari USD 1,90 per hari berdasarkan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Banyak faktor utama yang dapat menyebabkan kemiskinan, termasuk jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan atau perbedaan pendapatan antara kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi, rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran, dan faktor ekonomi ketika jual beli dimana terdapat kecenderungan dari kenaikan suatu harga. Selain itu kemiskinan dapat terjadi karena tingkat jumlah penduduk yang semakin bertambah serta diikuti dengan keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Selama distribusi belum merata maka kemiskinan akan terus mengalami peningkatan, sehingga nilai PDB per kapita dan pertumbuhan yang dicapai semakin tinggi.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan penduduk sebagai miskin ekstrem jika pengeluaran per kapita per hari berada di bawah Rp10.739, atau Rp322.170 per bulan. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03%, menurun dari 9,36% pada Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin ekstrem pada Maret 2024 adalah 0,83%, turun dari 1,12% pada Maret 2023.



Gambar 1. Kemiskinan Esktrim Indonesia 2023

Sumber: Peta kemiskinan ekstrem nasional dari Puskas BAZNAS

Penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi fokus utama dalam program pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 melalui berbagai strategi, termasuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, dan penguatan akses terhadap layanan dasar.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Periode Tahun 2021-2023

Tahun	Kemiskinan Ekstrem
2021	2,69%
2022	3,11%
2023	0,53%
2021	2,69%

Sumber: Rilis resmi pemerintah/TNP2K dan Kemenko PMK

Salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Jawa Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS 2024), provinsi Jawa Barat memiliki persentase penduduk miskin tertinggi ke-16 secara nasional. Namun, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi kedua pada negara ini. Salah satu daerah yang masih menghadapi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sumedang per maret 2023 persentase penduduk miskin sebsesar 7,62%, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 7,46%.

Dilihat dari data Pemkab Sumedang persentase penduduk kemiskinan ekstrem Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 36.820 jiwa (3,11%), pada tahun 2023 persentase penduduk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan menjadi 6.370 jiwa (0,53%). Sedangkan pada tahun 2024 tercatat persentase penduduk kemiskinan ekstrem sudah mencapai 0%.

Kecamatan Tanjungkerta terletak di Kabupaten Sumedang. Potret tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kecamatan Tanjungkerta yang berjumlah 28 Kartu Keluarga (KK) tahun 2023, sehingga pemerintah Kecamatan Tanjungkerta bersama aparatur desa memiliki inisiatif untuk melakukan sebuah gebrakan baru atau inovasi dalam bentuk PELITA (Peduli Tanjungkerta), asalnya tujuan utamanya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dikarenakan pada saat itu terdapat 28 KK kemiskinan ekstrem, namun demikian seiring berjalannya waktu kemiskinan ekstrem pada awal tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 22 KK dan sampai saat ini menjadi 0. Tetapi program pelita tidak dihapuskan begitu saja walaupun kemiskinan ekstrem tersebut sudah tidak ada, tetapi tetap berjalan dan ditargetkan sasaran-sasarannya yaitu masyarakat dengan kategori miskin.

Dilihat dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Pasal 3, Ayat 1, Bab 2, Poin 2.4.1.6 Urusan Sosial, Halaman 110, bahwa di Kecamatan Tanjungkerta terdapat 7.960 keluarga miskin.

Berdasarkan hasil yang sudah di sampaikan oleh (kasi) pemberdayaan masyarakat terhadap penduduk Kecamatan Tanjungkerta secara acak mengenai ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan lain sebagainya, kemiskinan di Kecamatan Tanjungkerta disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, masyarakat yang kurang melek akan pentingnya pendidikan, tingkat pernikahan dini tinggi, status pekerjaan, kepemilikan aset rendah, dan pandangan hidup sebagai manusia yang kurang baik. Beberapa faktor penentu kemiskinan ekstrem di Kecamatan Tanjungkerta yaitu pertama, faktor pendapatan. Hal ini karena ketika pendapatan tinggi penduduk akan dengan mudah memenuhi kebutuhannya sehingga kesejahteraan juga meningkat dan secara tidak langsung kemiskinan turun. Menurut kasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta memiliki pendapatan tidak setara UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) Kabupaten Sumedang. Hal ini karena sebagian dari mereka berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki pendapatan, bekerja sebagai buruh tani, dan serabutan lainnya yang hasilnya tidak seberapa.

Kedua, faktor pendidikan. Anak usia sekolah namun tidak menempuh pendidikan seperti pada umumnya menjadi hal biasa di Kecamatan Tanjungkerta. 2 dari 12 responden *pra survey* di Kecamatan Tanjungkerta menempuh pendidikan hingga sarjana. Sisanya, 2 orang lulus SMA, 5 orang lulus SMP, dan 3 orang hanya lulus SD. Rata-rata lama sekolah rendah meskipun berasal dari keluarga berada. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak memiliki kualifikasi yang baik di dunia pekerjaan sehingga banyak pengangguran dan tidak memiliki pendapatan. Kondisi ini banyak terjadi pada penduduk perempuan, penduduk laki-laki cenderung bekerja serabutan atau merantau keluar Pulau Jawa. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan kurangnya keterampilan tertentu seseorang yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

Ketiga, faktor pernikahan dini. Penduduk yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki pekerjaan memilih untuk nikah dini 7 dari 12 responden *pra survey* di Desa Kaliombo menikah pada usia di bawah 20 tahun. Faktor sosial-budaya yang masih melekat pada masyarakat pedesaan menyebabkan pernikahan dini semakin banyak dilakukan. Mereka beranggapan bahwa perempuan berumur 20 tahun termasuk “perawan tua” dan merupakan suatu aib bagi keluarga. Selain itu, ketidaktegasan pemerintah setempat dalam pelaksanaan pernikahan dini yang seharusnya tidak diperbolehkan. Selain itu, kemungkinan terjadinya pernikahan dini lebih besar dibandingkan lanjut bersekolah. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini yang pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan.

Keempat, status pekerjaan. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan tingkat pernikahan cenderung berbanding terbalik, dengan kata lain ketika tingkat pernikahan tinggi maka partisipasi angkatan kerja rendah dan sebaliknya. Selain itu, lahirnya kemiskinan dapat disebabkan oleh perilaku seseorang yang tidak produktif. Hasil *pra survey* mengenai pernikahan dini, 7 dari 12 responden di Kecamatan Tanjungkerta menikah usia di bawah 20 tahun dan mereka memutuskan untuk tidak bekerja karena berfokus menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT) meskipun berada pada usia produktif. Selebihnya, 3 penduduk bekerja dan 2 penduduk tidak bekerja namun belum menikah. Ketika mereka tidak bekerja, produktivitas mereka secara absolut akan rendah dan akan terjun dalam jurang kemiskinan.

Tabel 2. Jumlah KK Miskin Ekstrem Di Kecamatan Tanjungkerta

Tahun	Jumlah KK Miskin Ekstrem	Bantuan Per KK (Bulanan)
2023	28 KK	Rp 300.000.-
2024	22 KK	Rp 300.000.-
2025	0 KK	

Sumber: Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi bantuan tunai secara konsisten dari 2023 hingga 2024 berkorelasi dengan penurunan jumlah keluarga miskin ekstrem, hingga mencapai nol pada 2025.

Implementasi program merupakan salah satu elemen kunci dalam mendukung keberhasilan program kemandirian ekonomi masyarakat. Sebagai pilar utama, keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya membantu pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa intervensi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan lokal. Implementasi program ini mencakup berbagai bentuk, seperti pemberdayaan ekonomi, gotong royong dalam pembangunan infrastruktur, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada implementasi program pelita dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjungkerta sebagai pelaksana program PELITA (Peduli Tanjungkerta), program ini berfokus pada masalah penduduk yang memiliki status miskin ekstrim, namun berdasarkan observasi awal dilapangan, peneliti melihat adanya indikasi atau fenomena masalah yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dengan indikasi atau fenomena masalah sebagai berikut: Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta masih banyak yang memandang program bantuan sebagai bentuk pemberian sepihak tanpa memahami betul manfaat jangka panjang dari keterlibatan aktif dalam program tersebut. Sebagian besar penduduk cenderung menunggu bantuan dan kurang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Berdasarkan data yang ada, kurangnya pemahaman ini sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah maupun lembaga terkait.
2. Akses terhadap informasi mengenai berbagai program pengentasan kemiskinan sangat terbatas di beberapa desa di Kecamatan Tanjungkerta, Hal ini diungkapkan dalam survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumedang pada tahun 2023, yang menyebutkan bahwa 0,53% dari penduduk di desa-desa mengaku tidak memiliki informasi yang memadai tentang mekanisme program pemerintah seperti PKH dan BLT. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga pendamping, dan sarana komunikasi menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi program-program tersebut.
3. Komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan miskomunikasi dan ketidakpercayaan. Berdasarkan laporan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Sumedang, sekitar 40% masyarakat mengaku merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai manfaat dan proses program pemerintah. Hal ini mengarah pada ketidakpercayaan terhadap program yang dijalankan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini sudah mulai diterapkan di beberapa desa melalui forum musyawarah desa, namun implementasinya masih terbatas.

2. METHOD

Sebelum penelitian, terlebih dahulu peneliti menentukan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan. Berkaitan dengan metode penelitian, Sugiyono (2020: 2) mengemukakan bahwa.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang dikumpulkan oleh peneliti. Setiap peneliti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generasi.

Tabel 3. Subjek Penelitian

No	Umur	Jumlah (Orang)
1.	Camat Kecamatan Tanjungkerta	1
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Tanjungkerta	1
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1
4.	Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat	2
Jumlah		5

Adapun Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020), merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berikut data ini:

1. Studi Kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dengan meneliti secara mendalam yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi
 - d. Triangulasi

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-bener merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji data yang diperoleh. Sugiyono (2020) menjelaskan pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji Konfirmabilitas

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi penelitian Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengelolaan data yang dilakukan dengan mengacu kepada Teknik analisis dan model Miles dan Huberman (Sugiyono 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Menarik kesimpulan atau verifikasi

3. RESULT AND DISCUSSION

Implementasi merupakan tahap ketika tujuan, sasaran, prosedur, dan sumber daya program diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Menurut Wahab (2015), implementasi program merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Winarno (2015) juga mengemukakan bahwa suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan para elite apabila tidak diimplementasikan. Dengan demikian, kualitas Program PELITA tidak hanya ditentukan oleh kejelasan gagasannya, tetapi oleh kemampuan pelaksana mengubah bantuan sosial, pelatihan, dan pendampingan menjadi peningkatan kapasitas serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Program PELITA (Peduli Tanjungkerta) merupakan inisiatif lokal yang memanfaatkan dukungan pemerintah kecamatan dan desa, Forkopimcam, serta solidaritas masyarakat melalui infak dan sedekah. Orientasinya tidak semata-mata mengurangi beban masyarakat miskin dalam jangka pendek, tetapi mendorong penerima manfaat agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih stabil. Pendekatan tersebut relevan dengan temuan Komariyah dan Damayanti (2018) bahwa zakat produktif dapat mendukung kemandirian mustahik apabila bantuan diarahkan pada kegiatan produktif dan disertai pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program PELITA secara umum telah berlangsung cukup baik. Analisis dilakukan melalui standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, akuntabilitas, dan lingkungan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya sejumlah hambatan pada isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Pembahasan berikut menghubungkan temuan lapangan dengan teori yang telah digunakan dalam naskah awal serta 15 artikel ilmiah Indonesia periode 2018–2025.

1. Implementasi Program PELITA dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan Program PELITA telah memberikan arah bagi pelaksana dalam menentukan kelompok sasaran dan bentuk intervensi. Kerja sama unsur pemerintah dan dukungan infak serta sedekah masyarakat telah menghasilkan manfaat nyata bagi warga miskin ekstrem. Namun, terdapat kesenjangan pemahaman: pelaksana memahami program sebagai proses jangka panjang menuju kemandirian, sedangkan sebagian masyarakat memandangnya terutama sebagai bantuan tunai.

Kesenjangan tersebut penting karena pemahaman kelompok sasaran memengaruhi cara bantuan digunakan dan tingkat keterlibatan dalam pelatihan atau pendampingan. Subarsono (2015) menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar menjadi acuan pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan lanjutan. Oleh sebab itu, Program PELITA perlu membedakan secara eksplisit bantuan pemenuhan kebutuhan mendesak, bantuan modal produktif, pelatihan, dan target graduasi penerima.

Muhammad, Lubis, dan Hakim (2018) menemukan bahwa keberhasilan usaha mustahik pada program zakat produktif dipengaruhi oleh faktor penerima dan proses pendampingan. Nurbismi dan Ramli (2018) juga menunjukkan bahwa zakat produktif, pendapatan, serta kinerja pengelola berhubungan dengan kondisi kemiskinan mustahik. Temuan tersebut menguatkan bahwa standar PELITA perlu mencakup indikator keluaran dan hasil, misalnya penggunaan bantuan, keberlangsungan usaha, perubahan pendapatan, kemampuan menabung, dan berkurangnya ketergantungan.

b. Sumber Daya

Dimensi sumber daya belum sepenuhnya memadai. Pembiayaan Program PELITA bergantung pada infak dan sedekah rutin masyarakat, sehingga jumlah dan kontinuitasnya tidak selalu dapat dipastikan. Pelaksana berasal dari aparat desa, kecamatan, dan Forkopimcam dengan kompetensi administratif, tetapi belum seluruhnya memiliki keahlian profesional dalam pekerjaan sosial, pengembangan usaha, pengelolaan data, atau manajemen program.

Keterbatasan sumber daya tidak berarti program harus berhenti, tetapi menuntut prioritas dan strategi diversifikasi. Nasution dan Prayogi (2019) menemukan bahwa pemanfaatan zakat produktif dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Purnamasari dan Yuningsih (2022) juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis community development dapat memberi dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Bagi PELITA, dukungan dana sosial karena itu perlu dibagi secara proporsional antara bantuan konsumtif darurat dan investasi produktif yang disertai pendampingan.

Sarana dasar telah mendukung kegiatan utama, tetapi teknologi pendataan, logistik pelatihan, dan media presentasi masih perlu ditingkatkan. Normalization Process Theory dari May, Finch, dan koleganya (2006–2009, dan terus digunakan hingga 2020-an) menunjukkan bahwa teknologi baru hanya menjadi praktik rutin apabila dipahami, dijalankan bersama, didukung partisipasi, dan dievaluasi manfaatnya. Dalam Program PELITA, penggunaan teknologi belum sepenuhnya terlembagakan. Basis data penerima, riwayat bantuan, progres usaha, dan hasil pendampingan perlu disimpan dalam sistem sederhana yang dapat diperbarui oleh pelaksana.

c. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana belum sepenuhnya mendukung tuntutan program. Aparatur lokal mampu beradaptasi dan menjalankan administrasi, tetapi program pemberdayaan ekonomi membutuhkan keterampilan asesmen sosial, verifikasi penerima, kewirausahaan, pemasaran, pencatatan keuangan, dan pendampingan. Pelatihan serta evaluasi rutin yang telah dilakukan merupakan modal awal untuk membentuk kapasitas organisasi.

Dynamic Capabilities dan Human Capital Theory dari Teece dkk. (1997) beserta pengembangannya hingga 2018–2022 menjelaskan bahwa organisasi perlu mengembangkan kemampuan untuk mengenali perubahan, mengambil peluang, dan mentransformasi sumber daya. Dalam PELITA, pelatihan dan evaluasi rutin membentuk human capital, tetapi organisasi harus terus meningkatkan kemampuan adaptasi dan pengelolaan transformasi.

Sukirman, Halimah, dan Alexandri (2021) dalam penelitian Program KUBE di Kabupaten Bandung merekomendasikan sosialisasi menyeluruh, pengecekan kebutuhan penerima, dan peningkatan pendampingan agar keterampilan serta pemasaran usaha berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pelaksana PELITA perlu dilengkapi dengan mentor atau mitra teknis, bukan hanya petugas administrasi.

d. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana tergolong baik pada tingkat individual. Komitmen, kepedulian, dan kemauan membantu masyarakat menjadi kekuatan pelaksanaan. Akan tetapi, keberhasilan belum sepenuhnya ditopang oleh sistem kelembagaan. Semangat pelaksana dapat menurun apabila beban tugas bertambah, prosedur tidak jelas, sumber daya terbatas, atau tidak ada dukungan teknis.

Systems Theory dan Sociotechnical Systems dari Eric Trist dan kolega, yang terus dikembangkan hingga 2025, menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya ditentukan individu, tetapi oleh keselarasan manusia, struktur, proses, informasi, logistik, dan teknologi. Karena itu, semangat pelaksana PELITA perlu diimbangi dengan pembagian kerja, supervisi, alat pendataan, prosedur rujukan, dan dukungan organisasi.

Najmudin, Syihabudin, Fatoni, dan Sujai (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif bagi usaha mikro memerlukan pengelolaan yang mampu mendorong pemberdayaan. Sikap positif pelaksana perlu diterjemahkan menjadi konsistensi verifikasi, pendampingan, pencatatan, dan tindak lanjut sehingga perlakuan terhadap penerima tidak bergantung pada kedekatan personal.

e. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi telah berjalan melalui rapat dan hubungan kerja antara kecamatan, desa, Forkopimcam, serta unsur masyarakat. Kelemahannya terletak pada kualitas komunikasi kepada warga dan jangkauan sosialisasi. Sebagian masyarakat belum memahami tujuan, tahapan, kriteria, hak, kewajiban, serta bentuk dukungan setelah menerima bantuan.

Communication Theory of Participatory Development dari Servaes (2008–2016) menekankan bahwa komunikasi pembangunan tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi, tetapi harus membuka dialog dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi PELITA perlu memberi kesempatan bagi warga untuk bertanya, mengusulkan kebutuhan, mengoreksi data, dan menyampaikan kendala usaha.

El Yanda dan Widiastuti (2020) menemukan bahwa pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan dhuafa dapat menghasilkan keberhasilan usaha, tetapi juga menghadapi faktor kegagalan yang perlu dievaluasi. Komunikasi PELITA karena itu harus berlangsung selama siklus program—sebelum penetapan penerima, saat penyaluran, selama pendampingan, dan pada evaluasi hasil.

f. Akuntabilitas dan Lingkungan Program

Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pelaksana menjelaskan sumber dana, penetapan penerima, penggunaan bantuan, aktivitas pendampingan, dan hasil program. Akuntabilitas menjadi semakin penting karena PELITA menggunakan kepercayaan masyarakat dalam bentuk infak dan sedekah. Pelaporan yang ringkas, berkala, dan terbuka akan menjaga legitimasi sekaligus mendorong partisipasi donatur.

Faktor lingkungan dinilai cukup mendukung. Kondisi masyarakat menunjukkan perbaikan setelah memperoleh dana, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha kecil. Good Governance Theory UNDP (1997–2020) menempatkan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai prinsip utama tata kelola. Dalam Program PELITA, prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui komunikasi dua arah, keterbukaan kriteria, pembaruan data, dan evaluasi manfaat.

Rulloh dan Rosyidi (2018) menemukan bahwa dana produktif dapat meningkatkan modal, pendapatan, produksi, konsumen, dan kemampuan berinfak penerima. Choirunnisak (2018), sebaliknya, menunjukkan bahwa distribusi bantuan produktif yang tidak merata dan lemahnya keseriusan pengelolaan dapat menghambat pengembangan usaha. Kedua temuan ini menegaskan bahwa dampak positif PELITA harus diikuti pemerataan akses, pendampingan, dan pengukuran hasil.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program PELITA dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

Menurut Sunggono dalam Handani dan Frinaldi (2016), faktor penghambat implementasi meliputi isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat dimensi tersebut masih menyisakan hambatan. Karena saling berkaitan, kelemahan pada satu dimensi dapat memperbesar masalah pada dimensi lain; misalnya, isi kebijakan yang kurang adaptif akan sulit dijelaskan, membutuhkan sumber daya lebih besar, dan menimbulkan ketidakjelasan pembagian tugas.

a. Isi Kebijakan

Isi kebijakan PELITA memiliki arah dan struktur yang relatif jelas, tetapi masih terlalu birokratis, belum cukup fleksibel terhadap perbedaan kondisi desa, serta belum membedakan kebutuhan penerima berdasarkan tingkat kerentanan dan kesiapan usaha. Literatur mengenai challenges in public policy implementation yang dipublikasikan Universitas Jenderal Achmad Yani dan kajian lain pada 2015–2023 menekankan bahwa isi kebijakan yang tidak realistis, ketidaksesuaian tujuan dengan mekanisme, minimnya koordinasi, dan rendahnya partisipasi dapat menghasilkan hambatan struktural.

Brynard melalui Policy Implementation and the 5C Protocol (2010–2020) menempatkan content sebagai salah satu penentu implementasi. Isi kebijakan yang jelas, relevan dengan masalah, dan menyediakan petunjuk operasional membantu pelaksana mengurangi ambiguitas. Pada PELITA, kejelasan umum sudah tersedia, tetapi diperlukan kriteria graduasi, mekanisme penghentian atau pengalihan bantuan, prosedur pengaduan, dan strategi bagi usaha yang gagal.

Hidayat dan Tandilangi (2024) menemukan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan, tetapi masih menghadapi rendahnya partisipasi, keterbatasan sumber daya, dan kendala birokrasi. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan agar desain PELITA lebih sederhana, bertahap, dan berbasis tingkat kematangan penerima.

b. Informasi

Informasi teknis bagi aparat kecamatan relatif jelas dan mencakup sasaran, prosedur bantuan, serta jenis pelatihan. Kendalanya adalah distribusi informasi kepada masyarakat belum merata. Sosialisasi melalui rapat desa dan posyandu telah dijadwalkan, tetapi belum menjangkau seluruh kelompok, terutama warga yang jarang menghadiri forum atau memiliki keterbatasan akses digital.

B. Guy Peters (2015) dalam *Advanced Introduction to Public Policy* menegaskan bahwa informasi yang jelas, relevan, dan tepat waktu merupakan unsur penting implementasi. *Participation Continuum* yang dikembangkan World Bank dan Cornwall dkk. (2002–2015) membedakan penyampaian informasi dari partisipasi yang memberi pengaruh pada keputusan. Sosialisasi PELITA masih dominan pada *information sharing*; peningkatan menuju konsultasi dan kolaborasi diperlukan.

Fatihah dan Azizah (2024) menunjukkan bahwa program padat karya dapat mendukung kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga miskin, tetapi evaluasi implementasi perlu melihat hasil dan dampaknya. Informasi PELITA karena itu tidak hanya menyampaikan cara memperoleh bantuan, tetapi juga ekspektasi perubahan, kewajiban mengikuti pendampingan, dan cara menilai perkembangan.

c. Dukungan

Dukungan anggaran merupakan hambatan paling mendasar karena pembiayaan bergantung pada infak dan sedekah yang fluktuatif. Paul Cairney (2016) dalam *The Politics of Evidence-Based Policy Making* menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menciptakan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realisasi program. Karena itu, target PELITA perlu disesuaikan dengan proyeksi dana yang realistis dan dilengkapi cadangan untuk kegiatan pendampingan.

Ketepatan sasaran juga belum sempurna karena data desa belum selalu mutakhir. Kidd dan Athias (2020) menjelaskan *exclusion errors*, yakni warga miskin yang seharusnya menerima tetapi tidak tercakup, serta *inclusion errors*, yakni warga yang bukan sasaran justru menerima. Pembaruan data, verifikasi lapangan, musyawarah terbuka, dan kanal koreksi diperlukan untuk mengurangi kedua kesalahan tersebut.

Andriani, Sahrul, dan Hannan (2025) menemukan bahwa bantuan modal dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan, tetapi keberlanjutan terhambat oleh keterbatasan pendampingan, pelatihan lanjutan, dan pemasaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan PELITA tidak boleh dihitung hanya dari besaran bantuan; kualitas pendampingan dan akses pasar merupakan bagian dari sumber daya program.

d. Pembagian Potensi

Pembagian tugas telah dirumuskan melalui musyawarah desa dan kebijakan kecamatan, tetapi masih terjadi tumpang tindih peran, inkonsistensi pelaksanaan, keterlambatan laporan, dan dokumentasi yang tidak selalu mencerminkan keadaan lapangan. Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) dalam *Studying Public Policy* menyatakan bahwa perencanaan yang baik tidak cukup tanpa implementasi yang tertib dan terkoordinasi; ketidakjelasan tanggung jawab operasional menjadi penyebab umum kegagalan.

Masalah tersebut menunjukkan perlunya pemisahan fungsi pengumpulan dana, verifikasi penerima, persetujuan, penyaluran, pendampingan, serta evaluasi. Pemisahan fungsi memperjelas akuntabilitas dan mengurangi konflik kepentingan. Koordinator pada tingkat kecamatan tetap diperlukan untuk mengonsolidasikan laporan desa dan memastikan standar diterapkan secara konsisten.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Program PELITA dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

a. Penyempurnaan Isi Kebijakan

Upaya perbaikan dilakukan melalui pemetaan sosial untuk menemukan kelompok yang belum terjangkau dan memahami kebutuhan riil. Hasil pemetaan digunakan untuk menyesuaikan target, bentuk bantuan, serta pendampingan. Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) menekankan *adaptive policy design*, yaitu desain yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial. PELITA dapat menerapkan kategori intervensi: perlindungan darurat, pemulihan mata pencaharian, pengembangan usaha, dan graduasi.

Ladung dan Syukri (2023) menunjukkan bahwa program kemandirian ekonomi desa membutuhkan pengelolaan yang sesuai dengan potensi lokal. Pemetaan PELITA sebaiknya tidak berhenti pada kemiskinan rumah tangga, tetapi mencakup keterampilan, aset, jaringan, peluang usaha, dan risiko pasar sehingga bantuan produktif benar-benar sesuai.

b. Penguatan Informasi

Pemetaan sosial diikuti strategi komunikasi multikanal melalui media sosial resmi, video edukatif, materi cetak, forum desa, posyandu, serta pendekatan tatap muka. Langkah ini memungkinkan warga yang tidak memiliki akses digital tetap memperoleh informasi. Handoyo dkk. (2020) menegaskan bahwa pemetaan sosial penting untuk menyusun program tepat sasaran dan mengurangi kesenjangan penerima manfaat.

Materi komunikasi perlu menggunakan bahasa sederhana dan memuat tujuan, kriteria, tahapan, hak dan kewajiban, kanal pengaduan, serta kisah pembelajaran penerima. Setiap desa perlu mempunyai petugas kontak. Umpan balik masyarakat kemudian dicatat sebagai bahan perbaikan program, bukan hanya dijawab secara informal.

c. Penguatan Dukungan

Upaya penguatan dukungan meliputi pelatihan, perawatan alat, metode alternatif, koordinasi cepat, pengawasan komunitas, dan pemutakhiran data. Adaptive Governance dan Agile Governance sebagaimana dibahas Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) serta Luna dkk. (2015) menekankan kelincuhan organisasi dalam merespons kendala. Kelincuhan tersebut perlu tetap berada dalam prosedur yang transparan agar fleksibilitas tidak menimbulkan perlakuan yang tidak konsisten.

Pendanaan dapat diperluas melalui kemitraan dengan BAZNAS, lembaga amil zakat, dunia usaha, koperasi, perguruan tinggi, dan pelaku pemasaran. Kemitraan sebaiknya tidak hanya berupa donasi, tetapi juga mentor, akses pasar, literasi keuangan, dan teknologi. Sumber dana yang beragam akan mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumbangan.

d. Penegasan Pembagian Tugas

Pembagian tugas diperkuat melalui rapat koordinasi rutin dan dokumen kerja resmi yang menjelaskan siapa melakukan verifikasi, penyaluran, pendampingan, dokumentasi, serta evaluasi. Pelatihan berkala dan penghargaan bagi pelaksana yang berkinerja baik dapat meningkatkan komitmen. Grindle (2017) menekankan pentingnya kapasitas dan komitmen pelaksana, kejelasan tugas, serta dukungan pelatihan bagi keberhasilan program.

Dokumen pembagian tugas harus dilengkapi tenggat, format laporan, indikator, dan prosedur eskalasi masalah. Penghargaan perlu didasarkan pada kualitas data, ketepatan tindak lanjut, kepuasan masyarakat, dan perkembangan penerima, bukan sekadar banyaknya kegiatan.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV (Empat) mengenai Implementasi Program Pelita Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Selanjutnya penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Implementasi Program PELITA Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, dari 28 KK pada tahun 2023 menjadi 0 KK pada tahun 2025. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan tunai, tetapi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat melalui pengumpulan dana sukarela dan pemberdayaan ekonomi.

Faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Program Pelita Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang yaitu: Rendahnya partisipasi Masyarakat Kecamatan Tanjungkerta, kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta komunikasi yang belum optimal antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat cenderung bersikap pasif dan menunggu bantuan tanpa memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam program.

Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Program Pelita Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang yaitu: Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Langkah-langkah ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian ekonomi dan menjadikan mereka bagian dari solusi.

Secara keseluruhan, Program PELITA telah berkontribusi signifikan dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis lokal yang potensial untuk direplikasi di daerah lain.

REFERENCES

- Dwiyanto, A. (2014). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi, D. (2018). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik* (Cetakan ke-3). Alfabeta.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2, Cetakan ke-30). Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Center of Academic Publishing Service.
- Wahab, S. A. (2015). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=mHorEAAAQBAJ>
- Winarno, B. (2015). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. CAPS. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968602>
- Subarsono, A. G. (2015). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=646350>
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2016). Implementasi kebijakan publik. Dalam pembahasan faktor penghambat implementasi menurut Sunggono. <https://scholar.google.com/scholar?q=Handani+Frinaldi+2016+implementasi+kebijakan>
- Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781781955789>
- Cairney, P. (2016). *The politics of evidence-based policy making*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-51781-4>
- Kidd, S., & Athias, D. (2020). Hit and miss: An assessment of targeting effectiveness in social protection. Development Pathways. <https://www.developmentpathways.co.uk/publications/hit-and-miss-an-assessment-of-targeting-effectiveness-in-social-protection/>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/studying-public-policy-9780199026142>
- Muhammad, H., Lubis, D., & Hakim, D. B. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha mustahik pada program zakat produktif di LAZ An-Nuur. *Al-Muzara'ah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.1-14>
- Choirunnisak. (2018). Mustahik zakat produktif BAZNAS Yogyakarta dalam etika bisnis Islam. *Islamic Banking*, 3(2), 57–73. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.45>
- Nurbismi, & Ramli, M. R. (2018). Pengaruh zakat produktif, pendapatan, dan kinerja amil terhadap kemiskinan mustahik di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 2(2), 55–61. <https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.51>
- Rulloh, A. N., & Rosyidi, S. (2018). Dampak pendayagunaan dana zakat produktif terhadap keberhasilan usaha kecil menengah mustahiq. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(3), 184–199. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20183pp184-199>
- Komariyah, O., & Damayanti, N. (2018). Zakat produktif dan kemandirian mustahik. *Islaminomics*, 6(2). <https://doi.org/10.47903/ji.v6i2.40>
- Nasution, M. I., & Prayogi, M. A. (2019). The utilization of zakah productive towards micro-business growth and mustahik welfare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/jep.v20i1.6576>
- El Yanda, T. A. U., & Widiastuti, T. (2020). Dampak pendayagunaan zakat infak sedekah dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 911–925. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>
- Sukirman, Halimah, M., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program KUBE di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(3). <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34691>

-
- Purnamasari, T., & Yuningsih, I. (2022). Implementasi praktik Zakatnomics terhadap pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(3), 209–218. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/11150>
- Najmudin, Syihabudin, Fatoni, A., & Sujai. (2022). Utilization of productive zakat and its effect on empowerment of small micro business in Serang Regency. *Al Qalam*, 38(2), 251–266. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v38i2.4749>
- Ladung, F., & Syukri, F. (2023). Implementasi program kegiatan BUMDes dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *Jurnal Mirai Management*, 8(3). <https://journal.sticamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/6405>
- Hidayat, E. W., & Tandilangi, A. H. (2024). Analisis kemandirian ekonomi warga dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Semper Barat. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 24(1), 19–26. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/230>
- Fatihah, S. A., & Azizah, N. (2024). Evaluasi implementasi program padat karya dalam pemberdayaan keluarga miskin dan pramiskin di Kelurahan Semolowaru. *Economics and Business Management Journal*, 1(4). <https://doi.org/10.66084/ebmj.v1i04.264>
- Andriani, Sahrul, & Hannan, M. (2025). Implementasi program bantuan modal usaha tenaga kerja mandiri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di Kecamatan Polewali. *Journal Peqguruang*, 7(2). <https://doi.org/10.35329/jp.v7i2.6570>
- Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/1769>